

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Standar Akuntansi Keuangan

Laporan keuangan untuk tujuan umum dibuat untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan yang relevan dan andal dapat dihasilkan jika ada standar akuntansi. Pengguna laporan keuangan beragam dengan memiliki kebutuhan yang berbeda, oleh karena itu untuk menyusun laporan keuangan diperlukan standar akuntansi. Standar akuntansi yang berkualitas dapat dicapai jika memiliki kerangka konseptual yang berkualitas. Standar Akuntansi Keuangan merupakan suatu garis pedoman, hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang digunakan dalam pekerjaan akuntansi dan berlaku sebagai penuntun dalam praktik akuntansi. Standar akuntansi yang berlaku umum yang kita kenal di Indonesia ini salah satu diantaranya adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Adapun pengertian dari prinsip akuntansi yang berlaku umum itu sendiri menurut Subramanyam (2013:63) ialah Aturan yang menentukan kebijakan pengukuran dan pengakuan seperti bagaimana pengukuran suatu aset, kapan utang harus diakui, kapan pendapatan dan keuntungan diakui, serta kapan beban dan kerugian diakui. Aturan ini juga mengatur informasi apa yang harus disajikan pada catatan.

Sedangkan pengertian prinsip akuntansi yang berlaku umum menurut Pernyataan No.4 dari *Accounting Principles Board (APB) of the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)*, menyatakan bahwa : “*General Accepted Accounting Principles (GAAP)* mencatat pengalaman, alasan, kebiasaan, penggunaan dan kebutuhan praktis dan mereka...mencakup ketentuan, aturan dan prosedur yang diperlakukan untuk mendefinisikan praktik akuntansi yang berlaku umum pada satu waktu tertentu.”

Yang terakhir Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) menurut

Martani (2012:15) adalah berisikan pedoman untuk penyusunan laporan keuangan, pengaturan transaksi atau kejadian dan komponen tertentu dalam laporan keuangan.

Saat ini hanya dua standar akuntansi yang banyak dijadikan referensi atau diadopsi di dunia yaitu *International Financial Reporting Standard* (IFRS) dan *US Generally Accepted Accounting Principles* (US-GAAP). IFRS disusun oleh *International Accounting Standard Board* (IASB), sedangkan US-GAAP disusun oleh *Financial Accounting Standard Board* (FASB). Perkembangan terakhir menunjukkan keinginan untuk menyusun satu standar akuntansi yang berkualitas secara internasional semakin menguat. Banyak negara melakukan adopsi penuh IFRS untuk dijadikan standar lokal yang berlaku di negaranya.

2.1.2 Konvergensi IFRS

2.1.2.1 Pengertian *International Financial Reporting Standards* (IFRS)

Seiring dengan adanya perkembangan akuntansi, dimana perkembangannya terjadi sangat cepat baik dalam praktek maupun teori. Mengakibatkan sifat dari dunia usaha di seluruh dunia termasuk di Indonesia tidak lagi dibatasi hanya dalam suatu negara saja, melainkan juga sudah menjangkau dunia internasional. Hal ini yang mengakibatkan perlu adanya standar akuntansi yang berlaku secara internasional, guna menyeragamkan perlakuan akuntansi di seluruh dunia. Maka saat ini semua negara termasuk Indonesia telah mencanangkan program konvergensi standar akuntansinya ke dalam *International Financial Reporting Standards* (IFRS).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012:11) mendefinisikan *International Financial Reporting Standards* (IFRS) sebagai standar tunggal pelaporan akuntansi berkualitas tinggi dan kerangka akuntansi berbasis prinsip yang meliputi *professional judgement* yang kuat dengan *disclosures* yang jelas dan transparan mengenai substansi ekonomi transaksi, penjelasan hingga mencapai kesimpulan tertentu, dan akuntansi terkait transaksi tersebut.

Sedangkan menurut Abhiyoga (2013:71) *International Financial Reporting Standards* (IFRS) merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh *International Accounting Standard Board* (IASB). Standar

akuntansi internasional ini disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasional (IFAC).

Standar akuntansi internasional atau *International Financial Reporting Standards* (IFRS) sebelumnya bernama *International Accounting Standards* (IAS). IAS disusun oleh *International Accounting Standard Committee* (IASC), organisasi pendahulu dari IASB. IASC didirikan pada Juni 1973. Organisasi ini merupakan kesepakatan dari lembaga akuntansi nasional yang mewakili sepuluh negara, yaitu Australia, Jerman, Jepang, Meksiko, Belanda, Inggris, Irlandia, Kanada, Prancis dan Amerika Serikat. IASC berkembang dan terakhir memiliki anggota 143 lembaga akuntansi yang merepresentasikan lebih dari 2 juta akuntan. Pada tahun 1995 IASC menyelesaikan penyusunan satu set standar akuntansi komprehensif.

Menurut Martani (2012:16) IFRS sebagai standar internasional memiliki tiga ciri utama sebagai berikut :

1. *Principles-Based*

Standar yang menggunakan *principles-based* hanya mengatur hal-hal yang pokok dalam standar sedangkan prosedur dan kebijakan detail diserahkan kepada pemakai. Standar mengatur prinsip pengakuan sesuai substansi ekonomi, tidak didasarkan pada ketentuan detail dalam atribut kontrak perjanjian. Sedangkan standar yang *rule-based* memuat ketentuan pengakuan akuntansi secara detail. Keunggulan pendekatan ini akan menghindari dibuatnya perjanjian atau transaksi mengikuti peraturan dalam konsep pengakuan.

2. Nilai Wajar

Standar akuntansi banyak menggunakan konsep nilai wajar (*fair value*). Penggunaan nilai wajar untuk meningkatkan relevansi informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan. Informasi nilai wajar lebih relevan karena menunjukkan nilai terkini. Hal ini sangat bertolak belakang dengan konsep harga perolehan yang mendasarkan penilaian pada nilai perolehan pertama

(*historical cost*). Banyak pengakuan akuntansi saat ini yang dasar penilaiannya masih menggunakan *historical cost*. IFRS membuka peluang penggunaan nilai wajar yang lebih luas dan untuk beberapa item, seperti aset tetap dan aset tak berwujud, dibuka opsi penggunaan nilai wajar selain nilai perolehan. Nilai wajar lebih relevan namun harga perolehan diyakini lebih reliabel.

3. Pengungkapan

Mengharuskan lebih banyak pengungkapan (*disclosure*) dalam laporan keuangan. Pengungkapan diperlukan agar pengguna laporan keuangan dapat mempertimbangkan informasi yang relevan dan perlu diketahui terkait dengan apa yang dicantumkan dalam laporan keuangan dan kejadian penting yang terkait dengan item tersebut. Pengungkapan dapat berupa kebijakan akuntansi, rincian detail, penjelasan penting dan komitmen.

2.1.2.2 Adopsi *International Financial Reporting Standards (IFRS)*

Dengan memperhatikan semakin maraknya negara-negara lain seperti Australia mengadopsi IFRS secara penuh, maka pada tahun 2006 dalam kongres IAI X di Jakarta ditetapkan bahwa konvergensi penuh IFRS akan diselesaikan pada tahun 2008. Target ketika itu adalah taat penuh dengan semua standar IFRS pada tahun 2008. Namun dalam perjalanannya ternyata tidak mudah. Sampai akhir tahun 2008 jumlah IFRS yang diadopsi baru mencapai 10 standar IFRS dari total 33 standar.

Beberapa kendala dalam harmonisasi PSAK ke dalam IFRS antara lain adalah minimnya sumber daya untuk mendukung anggota DSAK-IAI yang semua anggotanya adalah paruh waktu bekerja untuk pengembangan standar pelaporan. Kendala lainnya adalah IFRS yang sangat cepat berubah sehingga DSAK-IAI sulit untuk mengujarnya. Kesiapan pelaku industri juga menjadi pertanyaan, ketidaksiapan industri keuangan khususnya perbankan dalam mengadopsi standar akuntansi instrumen keuangan PSAK 50 dan PSAK 55 membuat banyak pihak meragukan apakah Indonesia siap dalam mengadopsi IFRS.

Namun, terlepas dari segala kendala yang menghadang, DSAK-IAI semakin mengukuhkan niatnya untuk mengadopsi IFRS karena memang IFRS

memiliki banyak kelebihan. Menurut Ng Eng Juan dan Ersya Tri Wahyuni (2012:5) adalah sebagai berikut :

- 1) IFRS dihasilkan oleh suatu lembaga internasional yang independen sehingga pengaruh kekuatan politik dalam penyusunan standar dapat minimal.
- 2) Proses pembuatan IFRS lebih komprehensif melalui riset yang mendalam.
- 3) IFRS adalah standar yang berbasis prinsip (*principle based*) sehingga pengaturannya lebih sederhana dibandingkan dengan standar pelaporan keuangan keluaran Amerika Serikat yang lebih terperinci dan rumit (*rule based*).
- 4) IFRS mensyaratkan pengungkapan informasi (*disclosure*) yang lebih detail dan terperinci sehingga membantu pengguna laporan keuangan mendapatkan informasi yang relevan.
- 5) IFRS semakin diterima oleh banyak negara, terlebih setelah terbukti standar akuntansi Amerika Serikat tidak mampu membentengi skandal- skandal perusahaan besar seperti kasus Enron dan Worldcom.

Konvergensi dengan IFRS di Indonesia merupakan tindak lanjut dari kesepakatan anggota G20. Hal ini juga di dorong adanya kebutuhan dari pemangku kepentingan, seperti perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik dan regulator dalam rangka menciptakan infrastruktur yang diperlukan untuk transaksi pasar modal.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012:11) : Program konvergensi IFRS diharapkan akan meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan oleh laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan standar akuntansi keuangan yang berlaku secara internasional. Dampak dari program konvergensi IFRS menyebabkan SAK saat ini menjadi bersifat *principle-based*, banyak menggunakan *fair value*, memerlukan *professional judgement* dan semakin banyak pengungkapan.

Sejak Juni 2009, proses konvergensi IFRS mengalami percepatan. Sepanjang semester dua tahun 2009, DSAK-IAI menerbitkan kurang lebih 19 exposure draft PSAK dan ISAK juga mencabut beberapa PSAK yang sudah tidak relevan. Sepanjang tahun 2010 dan 2011, DSAL-IAI secara bertahap mengadopsi

IFRS. Sampai 1 Januari 2012, DSAK-IAI telah menerbitkan semua IFRS/IAS kecuali IAS 41 *Agriculture* dan IFRS 1 *First Time Adoption International Financial Reporting Standards*. DSAK-IAI belum mengambil keputusan kapan IAS 41 akan diadopsi.

IFRS 1 tidak relevan untuk diadopsi karena beberapa ketentuan transisi PSAK telah mempertimbangkan isi ketentuan dari IFRS 1 tersebut. Disamping pengaruh dari standar akuntansi internasional, DSAK juga mengeluarkan standar untuk usaha kecil dan SAK tentang syariah. DSAK membuat *roadmap* penerapan IFRS di Indonesia.

Tabel 2.1
Roadmap Penerapan IFRS

Tahap Adopsi (2008-2010)	Tahap Persiapan (2011)	Implementasi (2012)
<ul style="list-style-type: none"> • Adopsi seluruh IFRS Ke PSAK. • Persiapan infrastruktur yang diperlukan. • Evaluasi dan kelola dampak adopsi terhadap PSAK yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian persiapan infrastruktur. • Penerapan secara bertahap beberapa PSAK berbasis IFRS 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan PSAK berbasis IFRS secara bertahap • Evaluasi dampak penerapan PSAK berbasis IFRS secara bertahap

(Sumber: Wirahardja, 2012:7)

Berdasarkan tabel 2.1 yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa sasaran, yaitu:

1. Merevisi PSAK agar secara material sesuai dengan IFRS versi 1 Januari 2009 yang berlaku efektif tahun 2011/2012.
2. Konvergensi IFRS di Indonesia dilakukan secara bertahap.
3. Dalam perkembangannya nanti, akan terdapat PSAK yang akan dicabut, yaitu:
 - 1) PSAK 21: Ekuitas
 - 2) PSAK 23 : Akuntansi Koperasi

2.1.3 Manajemen Laba

2.1.3.1 Pengertian Manajemen Laba

Timbulnya manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori agensi. Sebagai agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) dan sebagai imbalannya akan memperoleh

kompensasi sesuai dengan kontrak. Terdapat dua kepentingan yang berbeda didalam perusahaan yaitu masing masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki. Manajemen sebagai pengelola perusahaan diberikan kekuasaan dan fleksibilitas untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan. Kontrak kerja meliputi wewenang dan tanggung jawab manajemen/pengelola atas persetujuan bersama (Anthony dan Govindrajan, 2017)

Pengertian teori keagenan menurut Supriyono, (2018: 63) adalah hubungan agensi merupakan kontrak, baik bersifat eksplisit maupun implisit, dimana satu atau lebih (yang disebut *principal*) meminta orang lain (yang disebut *agen*) untuk mengambil tindakan atas nama *principal*.

Konflik kepentingan (*conflict of interest*) sering kali terjadi dalam proses penyajian laporan keuangan dikarenakan dalam teori agensi mempunyai asumsi bahwa pihak pemilik dan pihak manajemen perusahaan termotivasi memiliki kepentingan masing-masing yang berbeda. Sedangkan permasalahan ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*) antara para pemangku kepentingan dengan manajemen perusahaan sering terjadi pada saat proses penyajian laporan keuangan, karena manajemen mempunyai lebih banyak informasi perusahaan dibandingkan pihak para pemangku kepentingan dan kemungkinan pihak manajemen lebih mementingkan kepentingan pribadi meskipun dapat merugikan pihak lain (Supriyono, 2018:65).

Suyudi (2009) Mengemukakan Teori keagenan menjelaskan apabila perusahaan berada dalam kinerja buruk, manajer dapat bertindak oportunistik dengan menaikkan laba akuntansi guna menyembunyikan kinerja yang buruk, sebaliknya bila perusahaan dalam kinerja baik manajer bertindak oportunistik dengan menurunkan laba akuntansinya untuk menunda kinerja yang baik

Dari penjelasan diatas, teori keagenan dapat menjadi landasan teori terhadap timbulnya penerapan manajemen laba. Sebagai *agen*, manajer mempunyai tanggung jawab untuk mengelola aktivitas dan mengoptimalkan keuntungan para *principal*/pemilik, sebagai imbalannya karena manajer dapat mengelola perusahaan dengan baik, manajer akan mendapatkan kompensasi atau

bonus sesuai dengan kontrak. Manajer memiliki dorongan dan motivasi untuk menerapkan metode akuntansi yang dapat memperlihatkan kinerja perusahaan yang baik untuk tujuan mendapatkan bonus dari prinsipal. Informasi yang lebih banyak dimiliki oleh manajemen dapat dimanfaatkan untuk tujuan tertentu yang bersifat *opportuistic*, serta diberikannya otoritas dan fleksibilitas kepada manajer memicu manajer melakukan manajemen laba.

Sulistyanto (2012:6) mendefinisikan manajemen laba adalah upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan.

Definisi manajemen laba menurut Djamaluddin (2008:56) adalah Perilaku yang dilakukan manajer menggunakan kebijakan (*judment*) dalam pelaporan keuangan dan dalam mengubah laporan keuangan dan dalam menyusun transaksi untuk mengubah laporan keuangan dan menyesatkan *stakeholders* mengenai kinerja ekonomi perusahaan, atau untuk mempengaruhi *contractual outcomes* yang tergantung pada angka akuntansi yang dilaporkan.

Menurut Lucy (2016) manajemen laba adalah suatu usaha yang dilakukan oleh manajemen untuk memanipulasi angka- angka akuntansi yang dilaporkan kepada pihak eksternal dengan tujuan untuk keuntungan bagi dirinya sendiri dengan cara mengubah atau mengabaikan standar akuntansi yang telah ditetapkan, sehingga menyajikan informasi yang tidak sebenarnya.

Perkembangan teori akuntansi positif tidak dapat dilepaskan dari ketidakpuasan praktisi terhadap teori normatif. Selanjutnya dinyatakan bahwa dasar pemikiran untuk menganalisa teori akuntansi dalam pendekatan normatif terlalu sederhana dan tidak memberikan dasar teoritis yang kuat. Menurut Chariri dan Ghozali (2007:101), teori akuntansi positif (*positive accounting theory*) menganut paham maksimisasi kemakmuran (*wealth-maximisation*) dan kepentingan pribadi individu. Jadi teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan sifat manajer yang memiliki dorongan untuk memaksimalkan kemakmurannya sendiri. Teori ini juga dapat digunakan untuk memprediksi kinerja buruk manajer yang dapat ditutupi oleh kenaikan laba yang diperoleh perusahaan.

Teori Akuntansi Positif menurut Chariri dan Ghozali (2007:101) menyatakan bahwa ada tiga hubungan keagenan:

1. Antara manajemen dengan pemilik (pemegang saham)

Apabila manajemen memiliki jumlah saham yang lebih sedikit dibanding dengan investor lain, maka manajer akan cenderung melaporkan laba lebih tinggi atau kurang konservatif. Hal ini dikarenakan prinsipal (pemegang saham) menginginkan dividen maupun *capital gain* dari saham yang dimilikinya. Sedangkan karena agen (manajer) ingin dinilai kinerjanya bagus dan mendapatkan bonus, maka manajer melaporkan laba yang lebih tinggi. Namun jika kepemilikan manajer lebih banyak dibanding para investor lain, maka manajemen cenderung melaporkan laba lebih konservatif. Karena rasa memiliki manajer terhadap perusahaan itu cukup besar, maka manajer lebih berkeinginan untuk memperbesar perusahaan. Dengan metoda konservatif, maka akan terdapat cadangan tersembunyi yang cukup besar untuk meningkatkan jumlah investasi perusahaan.

2. Antara manajemen dan kreditor

Manajemen cenderung melaporkan labanya lebih tinggi karena pada umumnya kreditor beranggapan bahwa perusahaan dengan laba yang tinggi akan melunasi utang dan bunganya pada tanggal jatuh tempo. Dengan kata lain kreditor beranggapan akan mengurangi tingkat risiko utang tidak dibayar. Kreditor dengan melihat laba yang tinggi cenderung akan mudah dalam memberikan pinjaman.

3. Antara manajemen dan pemerintah

Manajer cenderung melaporkan labanya secara konservatif. Hal ini dikarenakan untuk menghindari pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah, para analis sekuritas dan pihak yang berkepentingan lainnya. Pada umumnya perusahaan yang besar dibebani oleh beberapa konsekuensi. Misalnya harus menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dan harus membayar pajak yang lebih tinggi.

Berdasarkan hal tersebut maka inti dari hubungan keagenan bahwa di dalam hubungan keagenan terdapat pemisahan hubungan kepemilikan yaitu antara

pemegang saham dengan pihak pengendali yaitu manajemen atau yang mengelola perusahaan.

Prediksi teori akuntansi positif, Watts dan Zimmerman (1986: 200-221) menggunakan teori keagenan untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku manajemen sehubungan dengan pemilihan prosedur-prosedur akuntansi oleh manajer untuk mencapai tujuan tertentu

Sedangkan dari sisi regulasi dengan adanya perubahan peraturan penghitungan pajak penghasilan yang diatur melalui Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, akan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan manajemen laba. Perusahaan dapat menunda pendapatan atau mempercepat biaya, sehingga laba pada tahun berjalan akan lebih kecil dibandingkan laba sesungguhnya. Dampaknya pada tahun berikutnya adalah laba perusahaan akan lebih besar dibandingkan dengan laba sesungguhnya. Strategi ini mengakibatkan perusahaan dapat menghemat pengeluaran dari pembayaran pajak penghasilan, sehingga perusahaan mempunyai motivasi untuk melakukan manajemen laba dengan tujuan meminimalkan pajak.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa manajemen laba adalah suatu penyusunan laporan keuangan yang sengaja dilakukan oleh manajemen yang ditunjukkan pada pihak eksternal dengan cara meratakan, menaikkan dan menurunkan laporan laba dengan tujuan menciptakan kinerja perusahaan agar terkesan lebih baik dari yang sebenarnya serta untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi.

2.1.3.2 Strategi Manajemen Laba

Menurut Sulistyanto (2012:27) manajemen laba dapat dibagi menjadi empat bentuk yaitu:

1. Income Minimization

Manajemen laba ini dilakukan pada saat perusahaan mempunyai keuntungan yang tinggi dan tujuan perusahaan adalah untuk menghindari atau meminimalisasi pajak.

2. Income Maximization

Pola ini dilakukan saat manajemen berusaha meningkatkan pendapatan

dengan melaporkan laba bersih yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar, yaitu dengan cara mengakui pendapatan periode berikutnya ke periode sekarang atau mengakui beban periode sekarang ke periode mendatang.

3. *Taking Bath*

Pola ini biasanya dilakukan pada saat perusahaan mengalami tekanan atau restrukturisasi, yaitu dengan mengakui biaya yang sebenarnya baru terjadi di periode yang akan datang ke periode sekarang. Hal tersebut dilakukan untuk mendapat keuntungan yang tinggi pada periode mendatang.

4. *Income smoothing*

Manajemen memiliki insentif untuk melakukan perataan penghasilan untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan sehingga perusahaan terlihat stabil.

2.1.3.3 Motivasi Manajemen Laba

Menurut Sulistyanto (2012:63) mengemukakan terdapat terjadinya motivasi manajemen laba sebagai berikut:

1. *Bonus Scheme Hypothesis*

Kompensasi (bonus) yang didasarkan pada besarnya laba yang dilaporkan akan memotivasi manajemen untuk memilih prosedur akuntansi yang meningkatkan keuntungan yang dilaporkan demi memaksimalkan bonus mereka. Bonus minimal hanya akan dibagikan jika laba mencapai target laba minimal tertentu dan bonus maksimal dibagikan jika laba mencapai nilai tertentu atau lebih besar.

2. *Contracting Incentive*

Motivasi ini muncul ketika perusahaan melakukan pinjaman hutang yang berisikan perjanjian untuk melindungi kreditur dari aksi manajer yang tidak sesuai dengan kepentingan kreditur, seperti deviden yang berlebihan, pinjaman tambahan, atau membiarkan modal kerja atas laporan ekuitas berada di bawah tingkat yang ditetapkan, yang semuanya dapat meningkatkan risiko bagi kreditur, karena pelanggaran perjanjian dapat mengakibatkan biaya yang tinggi sehingga manajer perusahaan berharap untuk menghindarinya. Jadi manajemen laba dapat muncul sebagai alat untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran perjanjian dalam kontrak hutang.

3. *Political Motivation*

Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat.

4. *Tax Motivation*

Perpajakan merupakan motivasi yang paling jelas untuk melakukan manajemen laba. Manajemen berusaha untuk mengatur labanya agar pembayaran pajak lebih rendah dari yang seharusnya sehingga didapat penghematan pajak.

5. *Incentive Chief Executive Officer (CEO)*

CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka. Dan jika kinerja perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan.

6. *Initial Public Offering (IPO)*

Perusahaan yang akan *go public* belum memiliki nilai pasar, dan menyebabkan manajer perusahaan yang akan *go public* melakukan manajemen laba dalam prospectus mereka dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan.

2.1.3.4 Teknik Manajemen Laba

Menurut Sulistyanto (2012:37) teknik manajemen laba dapat juga dilakukan dengan tiga teknik yaitu:

1. Meninjau kembali dan mengubah berbagai estimasi akuntansi

Permainan manajerial ini biasa dilakukan dengan meninjau kembali dan mengubah berbagai estimasi akuntansi yang selama ini telah digunakan perusahaan. Sebagai contoh adalah umur ekonomis aktiva tetap (*tangible assets*) dan aktiva tidak berwujud (*intangible assets*), prosentase biaya kerugian piutang, dan lain-lain.

2. Mengubah atau mengganti metode akuntansi

Manajer mempunyai kebebasan untuk mengubah atau mengganti metode akuntansi yang selama ini dipakainya dengan metode akuntansi lain. Hal inilah yang mendorong atau memotivasi seorang menejer untuk mengoptimalkan kepentingan dan kesejahteraan pribadi. Seorang menejer hanya mau menggunakan suatu metode akuntansi tertentu apabila ada manfaat yang bisa diperoleh.

3. Permasalahan cadangan

Cadangan (*reserves*) merupakan laba yang ditarik ke belakang dari periode pengakuan sesungguhnya dan menggunakan pada saat dibutuhkan. Sebagai contoh adalah cadangan kerugian piutang, penurunan nilai persediaan, dan lain-lain. Hal ini dilakukan perusahaan dengan tujuan agar laba yang dilaporkan perusahaan pada periode berjalan tidak terlalu tinggi. Sebaliknya, pada saat menginginkan labanya menjadi lebih tinggi maka perusahaan dapat menggunakan cadangan itu untuk mengatur laba sesuai dengan keinginannya itu.

2.1.3.5 Pendekatan Manajemen Laba

Pada umumnya pendeteksian manajemen laba dilakukan dengan menggunakan pendekatan *accrual*. Pendekatan ini akan menggunakan pengukuran berbasis akrual (*accrual based measures*) dalam mendeteksi ada tidaknya manipulasi.

Ada tiga pendekatan untuk mendeteksi manajemen laba menurut Sulistyanto (2012:211), yaitu:

1. Model Berbasis *Aggregate Accrual*

Model yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas rekayasa ini dengan menggunakan *discretionary accrual* sebagai proksi manajemen laba.

2. Model berbasis *Spesific Accruals*

Pendekatan yang menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item atau komponen laporan keuangan tertentu dari industri tertentu atau cadangan piutang dari industri asuransi.

3. Model Berbasis *Distribution Of After Management*

Pendekatan ini dikembangkan dengan melakukan pengujian secara statistik terhadap komponen-komponen laba untuk mendeteksi faktor- faktor yang mempengaruhi pergerakan laba.

2.1.3.6 Pengukuran Manajemen Laba

Metode yang digunakan untuk pendeteksian manajemen laba ini mengikuti model yang dikembangkan oleh Jones (1991) yang dikenal sebagai (*Modified Jones Model*), yang merupakan modifikasi dari *Jones Model*.

Menurut Sulistyanto (2012:225) menyatakan bahwa model Jones Modifikasi (*Modified Jones Model*) merupakan modifikasi dari model Jones yang didesain untuk mengeliminasi kecenderungan untuk menggunakan perkiraan yang bisa salah dari model Jones untuk menentukan *disrectionary accrual* ketika disrection melebihi pendapatan.

Menurut Sulistyanto (2012:225) langkah-langkah yang dilakukan dalam perhitungan *disrectionary accruals* (DTA), yaitu:

1. Menghitung nilai total akrual (TAC)

$$\mathbf{TAC = Net\ Income - Cash\ Flow\ From\ Operations}$$

2. Menghitung nilai *current accruals*

$$\mathbf{Current\ Accruals = D\ (current\ assets - cash) - D\ (current\ liabilities - current\ maturity\ of\ long\ term\ debt)}$$

3. Menghitung nilai *nondidrectionary accruals*

$$\mathbf{NDAC_{it} = \alpha_1 \left[\frac{1}{TA_{i,t}} \right] + \alpha_2 \left[\frac{\Delta sales_{i,t} - \Delta TR_{i,t}}{TA_{i,t}} \right]}$$

Keterangan:

$NDCA_{it}$ = *Nondisrectionary current accruals* perusahaan *i* periode *t*

α_1 = *Estimated intercept* perusahaan *i* periode *t*

α_2 = Slope untuk perusahaan *i* periode *t*

$TA_{i,t-1}$ = Total asset untuk perusahaan *i* periode *t*

$Sales_{i,t}$ = Perubahan penjualan perusahaan *i* periode *t*

$TR_{i,t}$ = Perubahan dalam piutang dagang perusahaan *i* periode *t*

4. Menghitung nilai *disrectionary current accruals*

$$\mathbf{DCA_{i,t} = \frac{CurrAcc_{i,t}}{TA_{i,t-1}} - NDCA_{i,t}}$$

Keterangan:

$DCA_{i,t}$ = *Disrectionary current accruals* perusahaan i periode t

$CurrAcc_{i,t}$ = *Current accruals* perusahaan i periode t

$TA_{i,t-1}$ = Total aktiva perusahaan i periode t

$NDCAI_{i,t}$ = *Nondisrectionary current accruals* perusahaan i periode t

5. Menghitung nilai *nondisrectionary accruals*

$$NDA_{i,t} = b_0 \left[\frac{1}{TA_{i,t-1}} \right] + b_1 \left[\frac{\Delta sales_{i,t} - \Delta TR_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right] + b_2 \left[\frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right]$$

Keterangan:

b_0 = *Estimated intercept* perusahaan i periode t

b_1, b_2 = Slope untuk perusahaan i periode t

$PPE_{i,t}$ = Aktiva tetap (*gross property, plant, and equipment*) perusahaan i periode t

6. Menghitung nilai *disrectionary accruals, disrectionary long-term accruals, dan nondisrectionary long-term accruals*

$$DCA_{PT} = (TAC_{PT}/Sales_{PT}) - (TAC_{PD}/Sales_{PD})$$

Keterangan:

PT = Periode Tes

PD = Periode Dasar

2.1.4 *Corporate Governance*

Corporate governance merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham. Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu perangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. (KNKG, 2006).

Good corporate governance dipandang sebagai upaya pengendalian yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kinerja manajemen dengan melakukan pengendalian yang lebih diarahkan pada pengawasan perilaku manajer, sehingga

tindakan yang dilakukan oleh manajer dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menyusun suatu pedoman yang dijadikan acuan dalam penerapan *corporate governance*. Dalam pedoman tersebut KNKG memaparkan prinsip-prinsip *corporate governance* sebagai berikut (KNKG, 2006):

1. Transparansi (*Transparency*)

Yaitu mengelola perusahaan secara transparan dengan semua *stakeholder* (orang-orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas perusahaan). Di sini para pengelola perusahaan harus berbuat secara transparan kepada penanam saham, jujur apa adanya dalam membuat laporan usaha, tidak manipulatif. Keterbukaan informasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi yang dianggap penting dan relevan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban dalam perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Manajemen harus membuat *job description* yang jelas kepada semua karyawan dan menegaskan fungsi-fungsi dasar setiap bagian. Dari sini perusahaan akan menjadi jelas hak dan kewajibannya, fungsi dan tanggung jawabnya serta kewenangannya dalam setiap kebijakan perusahaan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Yaitu menyadari bahwa ada bagian-bagian perusahaan yang membawa dampak pada lingkungan dan masyarakat pada umumnya. Di sini perusahaan harus memperhatikan amdal, keamanan lingkungan, dan kesesuaian diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat setempat. Perusahaan harus apresiatif dan proaktif terhadap setiap gejolak sosial masyarakat dan setiap yang berkembang di masyarakat.

4. Independensi (*Independency*)

Yaitu berjalan tegak dengan bergandengan bersama masyarakat. Perusahaan harus memiliki otonominya secara penuh sehingga pengambilan-pengambilan keputusan dilakukan dengan pertimbangan otoritas yang ada secara penuh. Perusahaan harus berjalan dengan menguntungkan supaya bisa memelihara

keberlangsungan bisnisnya, namun demikian bukan keuntungan yang tanpa melihat orang lain yang juga harus untung. Semuanya harus untung dan tidak ada satu pun yang dirugikan.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Yaitu semacam kesetaraan atau perlakuan yang adil di dalam memenuhi hak dan kewajibannya terhadap stake holder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus membuat sistem yang solid untuk membuat pekerjaan semuanya seperti yang diharapkan. Dengan pekerjaan yang fair tersebut diharapkan semua peraturan yang ada ditaati guna melindungi semua orang yang punya kepentingan terhadap keberlangsungan bisnis kita.

Berbagai penelitian terkait *corporate governance* menghasilkan berbagai mekanisme yang meyakinkan *stakeholder* bahwa tindakan manajemen laba selaras dengan kepentingan mereka. Mekanisme *corporate governance* dibagi menjadi duabagian yaitu mekanisme *internal governance* seperti proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas audit, kompensasi eksekutif dan mekanisme *eksternal governance* seperti pengendalian oleh pasar dan level *debt financing* (Nastiti, 2015).

2.1.4.1 Proporsi Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris merupakan bagian organ perusahaan yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan penuh atas pengelolaan perusahaan. Sementara komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006). Jumlah komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu dari komisaris independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan.

Keberadaan komisaris independen telah diatur Bursa Efek Jakarta (BEJ) melalui peraturan BEJ No.Kep-305/BEJ/07-2004. Peraturan tersebut menyiratkan

bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa harus mempunyai komisaris independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham yang minoritas. Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Wallace dan Peter dalam Ujijantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki proporsi anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan, atau *outside director* dapat mempengaruhi tindak manajemen laba, sehingga akan meningkatkan pengawasan dan akan mengurangi tindakan manajer dalam melakukan manajemen laba.

Menurut Peraturan BEJ No.Kep-305/BEJ/07-2004, persyaratan menjadi komisaris independen pada Perusahaan Tercatat adalah sebagai berikut:

- a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perusahaan tercatat yang bersangkutan;
- b. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direktur dan/atau komisaris lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan;
- c. Tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan;
- d. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

2.1.4.2 Ukuran Dewan Komisaris

Dalam pedoman GCG 2006 disebutkan bahwa dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan, memberikan nasihat kepada direksi, memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, pada pasal 108 ayat (5) menjelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, wajib memiliki paling sedikitnya 2 (dua) anggota dewan komisaris. Oleh karena itu, jumlah anggota dewan komisaris dalam tiap perusahaan berbeda-beda jumlahnya karena harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Agar pelaksanaan tugas dewan komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:

1. Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan

secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.

2. Anggota dewan komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

2.1.4.3 Komite Audit

Menurut Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-643/BL/2012 dalam peraturan nomor IX.1.5, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Menurut peraturan tersebut, struktur dan keanggotaan komite audit adalah sebagai berikut:

- a. Komite audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik.
- b. Komite audit diketuai oleh komisaris independen.
- c. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik tersebut;
 3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut; dan
 4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut.

Tugas komite audit membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa:

- (i) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang

berlaku umum, (ii) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (iii) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen (KNKG, 2006).

2.1.4.4 Kualitas Auditor

Auditing adalah bentuk monitoring yang digunakan oleh perusahaan untuk menurunkan biaya keagenan (*agency cost*) perusahaan dengan pemegang hutang (*bond holder*) dan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976). Nilai *auditing* timbul karena *auditing* menurunkan pelaporan yang salah atas informasi akuntansi (Nastiti, 2015). Hasil dari proses *auditing* dicerminkan dalam bentuk penyajian laporan keuangan oleh perusahaan. Hasil audit tidak bisa diamati secara langsung sehingga pengukuran variabel kualitas audit maupun kualitas auditor menjadi sulit untuk dioperasionalkan. Oleh karena itu, para peneliti terdahulu kemudian mencari indikator pengganti dari kualitas auditor.

Putri (2019) menyatakan bahwa dimensi kualitas auditor yang paling sering digunakan dalam penelitian adalah ukuran kantor akuntan publik atau KAP karena nama baik perusahaan (KAP) dianggap merupakan gambaran yang paling penting. Becker, dkk. Herawaty (2014) menyatakan bahwa klien dari auditor Non Big 6 melaporkan *discretionary accrual* yang lebih tinggi dari yang dilaporkan oleh klien auditor Big 6. Berarti dapat disimpulkan bahwa klien dari auditor Non Big 6 cenderung lebih tinggi dalam melakukan *earnings management*. Karena pada saat penelitian ini KAP Big 6 telah berubah menjadi Big 4, maka juga diduga bahwa klien dari KAP Non Big 4 cenderung lebih tinggi dalam melakukan *earnings management* dibandingkan dengan klien dari KAP Big 4.

2.1.4.5 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan saham institusional merupakan jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga. Kepemilikan institusional terdiri atas kepemilikan saham oleh pihak institusi antara lain bank, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Menurut Herawaty (2014), kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen

melakukan manajemen laba. Pernyataan ini sesuai dengan Madiastuty dan Mahfoedz (2003) menyatakan bahwa investor institusional dianggap sebagai *sophisticated investor* dengan jumlah kepemilikan yang cukup signifikan sehingga dapat memonitor manajemen perusahaan yang pada akhirnya akan mengurangi motivasi manajer untuk melakukan manajemen laba.

2.1.4.6 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan yang dikuasai oleh dewan direksi, manajemen, komisaris maupun pihak yang ikut serta dalam pengambilan keputusan (Anggraeni, 2013). Kepemilikan manajerial didalam perusahaan bertugas untuk menyeimbangkan kepentingan manajer dengan kepentingan pemegang saham eksternal. Keputusan dan aktivitas di perusahaan dengan kepemilikan manajerial tentu akan berbeda dengan perusahaan tanpa kepemilikan manajerial. Perusahaan dengan kepemilikan manajerial, manajer yang sekaligus sebagai pemegang saham yang digunakan untuk menyeimbangkan kepentingannya dengan kepentingan pemegang saham.

2.2 Kerangka Pemikiran

International Financial Reporting Standards (IFRS) menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012:11) adalah standar tunggal pelaporan akuntansi berkualitas tinggi dan kerangka akuntansi berbasiskan prinsip yang meliputi *professional judgement* yang kuat dengan *disclosures* yang jelas dan transparan mengenai substansi ekonomi transaksi, penjelasan hingga mencapai kesimpulan tertentu, dan akuntansi terkait transaksi tersebut.

Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Abhiyoga (2013:71) yang mengemukakan *International Financial Reporting Standards* (IFRS) merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh *International Accounting Standard Board* (IASB).

Variabel independen pada penelitian ini adalah konvergensi IFRS. Pengukuran ini didasarkan pada laporan mengenai perbandingan antara GAAP local suatu negara dibandingkan IFRS yang dikeluarkan oleh kantor akuntan public seperti Ernst dan Young, Price water house, Cooper, Deloitte, dan KMPG yang bersifat global. Kriteria Pengukuran variabel yang digunakan sebagai

berikut: Nilai 1 apabila dalam laporan mengenai perbandingan GAAP local (PSAK) dengan IFRS dinyatakan bahwa tidak ada standar akuntansi yang ekuivalen dengan GAAP local. Nilai 2 apabila laporan mengenai perbandingan antara GAAP local (PSAK) dengan IFRS terdapat standar yang ekuivalen, namun tidak sama dengan IFRS dan dijelaskan mengenai perbedaan-perbedaannya. Misalnya dalam PSAK mengakui satu dari dua criteria tersebut. Nilai 3 apabila laporan mengenai perbandingan antara GAAP local (PSAK) dengan IFRS dinyatakan bahwa standar GAAP local mirip dengan IFRS dengan pengecualian tertentu. Nilai 4 apabila laporan mengenai perbandingan antara GAAP local (PSAK) dengan IFRS dinyatakan bahwa standar dalam GAAP local mirip dengan IFRS seluruhnya tanpa ada penjelasan mengenai perbedaan antara GAAP dan IFRS.

Didalam teori keagenan terdapat hubungan antara principal dan agen (Jao dan Pagulung, 2011). Manajemen diharuskan untuk menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk tanggungjawab kepada pemegang saham. Di lain sisi, principal wajib mengetahui bagaimana kemampuan manajemen dalam perusahaan dengan informasi yang asimetri yang menjadikan cara untuk melakukan manajemen laba sehingga diperlukan konvergensi IFRS.

Hal ini didukung dengan hasil penelitian dari Putri (2019) yang menyatakan konvergensi IFRS berpengaruh terhadap manajemen laba artinya konvergensi IFRS menjadi faktor yang sangat penting yang berpengaruh terhadap manajemen laba. Semakin besar konvergensi IFRS, maka semakin rendah manajemen laba didalam perusahaan.

Corporate Governance dalam penelitian ini diproksikan dengan kepemilikan manajerial yang disinyalir dapat memoderasi pengaruh IFRS terhadap manajemen laba, hal ini sesuai dengan teori keagenan yang menjelaskan bahwa adanya konflik yang terjadi antara *principal* dan *agent* dimana agen mendapatkan informasi yang lebih banyak dibandingkan *principal* sehingga menimbulkan informasi yang asimetri (Priantinah, 2008). Adanya informasi yang asimetri dapat menyebabkan manajer untuk melakukan manajemen laba yang dapat merugikan perusahaan. Cara untuk mencegah adanya perbedaan

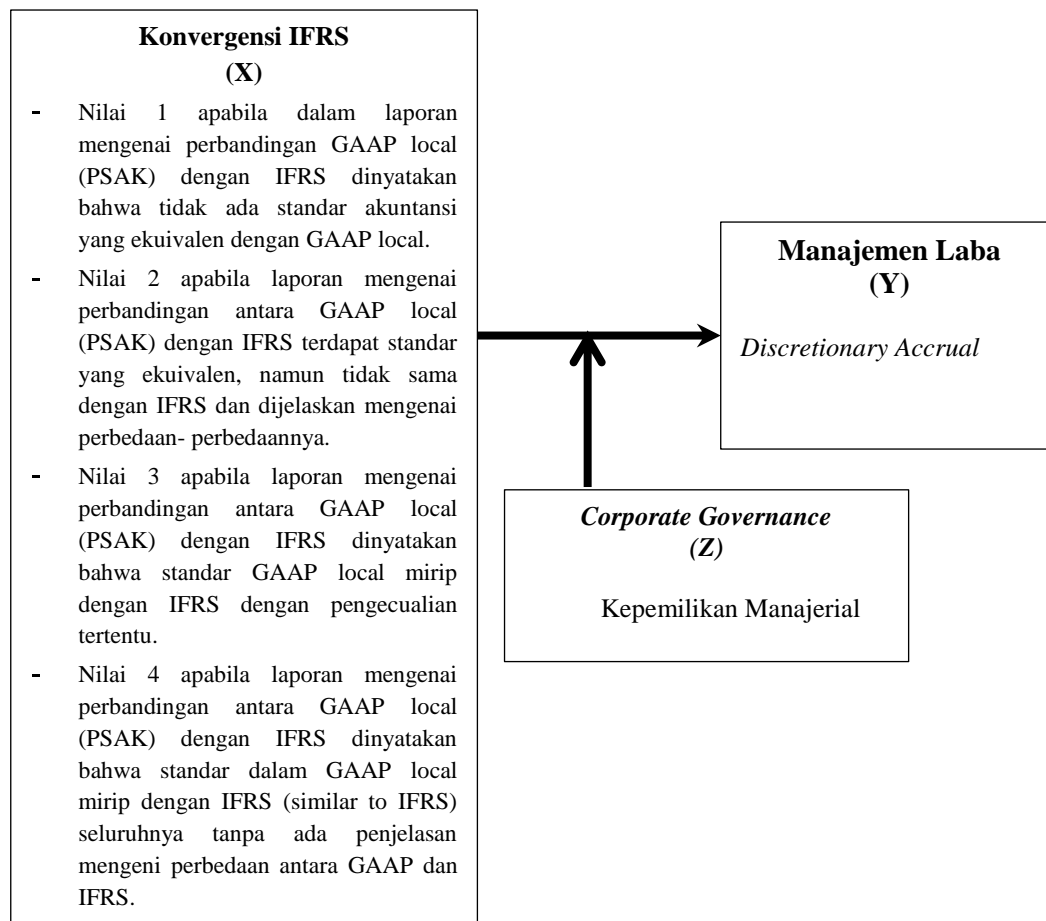
kepentingan maka diperlukan adanya proporsi dewan komisaris independen didalam suatu perusahaan.

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham yang dikuasai oleh direksi, manajemen, komisaris maupun pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan (Anggraeni, 2013). Penelitian lain yang dilakukan oleh Jao dan Pagulung (2011) mengungkapkan kepemilikan saham yang besar dapat dilihat dari nilai ekonomisnya yang dapat digunakan untuk memonitor. Apabila kepemilikan manajerial rendah, maka perilaku yang menguntungkan manajer akan semakin tinggi. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nastiti (2015) mengungkapkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap manajemen laba namun memiliki pengaruh yang lemah.

Kepemilikan manajerial memoderasi antara konvergensi IFRS terhadap manajemen laba. Mekanisme kepemilikan manajerial yang ada di perusahaan dapat mencegah meningkatnya manajemen laba yang dikarenakan adanya konvergensi IFRS pada perusahaan dengan dua cara. Pertama, adanya proses manajemen resiko. Jika struktur kepemilikan manajerial memiliki kualitas yang tinggi maka akan meningkatkan kualitas proses manajemen resiko (Katsurayya, 2016). Kedua, dengan cara monitoring. Apabila *corporate governance* berkualitas tinggi maka akan meningkatkan kualitas monitoring sehingga dapat mencegah perilaku yang menguntungkan para manajer maupun pemegang saham.

Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Putri (2019) mengungkapkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme yang membatasi perilaku yang dapat menguntungkan manajer dalam melakukan manajemen laba. Dengan mengadopsi IFRS sebagai standar akuntansi maka akan mendorong adanya keterbukaan pada semua bidang. Semakin besar kepemilikan manajerial makasemakin rendah manajemen laba.

Berdasarkan uraian di atas maka model kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Model Kerangka Pemikiran Penelitian

2.3 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan maka hipotesis dari penelitian ini ialah : *Konvergensi IFRS* Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba dan *Corporate Governance* yang di proksikan dengan Proporsi Kepemilikan Manajerial Memoderasi Pengaruh Konvergensi IFRS terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020.